



## **KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA SUKABUMI TENTANG PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA PUBLIK**

### ***SUKABUMI CITY GOVERNMENT POLICY REGARDING THE PROVISION OF PUBLIC SPORTS FACILITIES AND INFRASTRUCTURE***

**<sup>1</sup>Indra Ramadhan, <sup>2</sup>Aridaya Yohhandi**

<sup>1</sup>Pendidikan Kepelatihan Olahraga, Fakultas Ilmu Keolahragaan  
Universitas Negeri Semarang

<sup>2</sup>Pendidikan Ekonomi

Universitas Linggabuana PGRI Sukabumi

[indraramadhan@mail.unnes.ac.id](mailto:indraramadhan@mail.unnes.ac.id), [yohhandiaridaya@gmail.com](mailto:yohhandiaridaya@gmail.com)

#### **ABSTRAK**

Salah satu kebijakan pemerintah dalam hal pemenuhan kebutuhan rakyat adalah tersedianya sarana dan prasarana olahraga yang dapat digunakan oleh masyarakat secara umum. Setiap kebijakan yang diputuskan terdapat beberapa kekurangan yang harus diidentifikasi dan dievaluasi agar kebijakan tersebut tepat sasaran. Sehingga perlu adanya sebuah penilaian dalam bentuk studi evaluasi terkait kebijakan pemerintah daerah yang mengatur penyediaan fasilitas olahraga bagi publik yang dapat dimungkinkan adanya perbaikan dan mengeluarkan kebijakan yang baru sehingga kebijakan tersebut lebih efektif dan tepat sasaran. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kebijakan Pemerintah Kota Sukabumi mengenai penyediaan, pengelolaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga di Kota Sukabumi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif verifikasi. Kebijakan pemerintah tentang penyediaan Sarana dan Prasarana olahraga public merupakan subjek penelitian ini. Sumber data pada penelitian ini adalah informasi yang diberikan oleh Walikota Sukabumi, Kepala Disporapar, para Camat dan Lurah se Kota Sukabumi, dan dokumen peraturan daerah kota Sukabumi yang berkaitan dengan olahraga. Pengambilan sampel menggunakan snowball sampling. Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi, mengkaji dokumen dan arsip. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana olahraga publik di Kota Sukabumi jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, meskipun ketersediaannya belum merata pada setiap kecamatan. Ketersediaan sarana dan prasarana olahraga juga tidak diikuti dengan pemahaman masyarakat mengenai fungsi dan tujuan tersedianya sarana dan prasarana olahraga, sehingga kondisi sarana dan prasarana olahraga tidak terawat, bahkan dimanfaatkan bukan untuk keperluan kegiatan olahraga. Perlu adanya pengelolaan yang ideal dan faktual terhadap sarana dan prasarana olahraga sehingga semua masyarakat bisa menggunakan sarana dan prasarana olahraga yang tersedia di Kota Sukabumi dengan maksimal.

Kata kunci: Kebijakan; pemanfaatan; pengelolaan; sarana dan prasarana olahraga public.

#### **ABSTRACT**

*One of the government policies in terms of meeting people's needs is the availability of sports facilities and infrastructure that can be used by the public in general. Every policy that is decided has several deficiencies that must be identified and evaluated so that the policy is right on target. So that it is necessary to have an assessment in the form of an evaluation study related to local government policies that regulate the provision of sports facilities for the public which can make it possible to improve and issue new policies so that these policies are more effective and on target. The purpose of this study was to describe the policies of the Sukabumi City Government regarding the provision, management and utilization of sports facilities and infrastructure in the City of Sukabumi. The research method used is qualitative verification. Government policy regarding the provision of public sports facilities and infrastructure is the subject of this study. The source of the data in this study was information provided by the Mayor of Sukabumi, the Head of Disporapar, Sub-District Heads and Lurahs throughout Sukabumi City, and local regulations documents for the city of Sukabumi related to sports. Sampling using snowball sampling. Research data collection was carried out by interviewing mendalam, observation, reviewing documents and archives. The results of this study indicate an increase in the availability of public sports facilities and infrastructure in Sukabumi City when compared to previous years, although the availability has not been evenly distributed in each sub-district. The availability of sports facilities and*

*infrastructure is also not followed by public understanding of the function and purpose of providing sports facilities and infrastructure, so that the conditions of sports facilities and infrastructure are not maintained, and are not even used for sporting activities. There needs to be ideal and factual management of sports facilities and infrastructure so that all people can use the sports facilities and infrastructure available in Sukabumi City to the fullest.*

*Keywords: Policy; utilization; management; public sports facilities and infrastructure.*

## **PENDAHULUAN**

Kebijakan pembangunan melalui olahraga (Development through Sport) merupakan hal yang hangat diperbincangkan di negara maju (Black, 2017; Collison, 2018). Terdapat perbedaan pendekatan antara pembangunan olahraga (Development of Sport) dan pembangunan melalui olahraga (Development through Sport) (MacIntosh & Spence, 2012). Secara umum, istilah pembangunan olahraga mengacu pada partisipasi dalam olahraga serta peningkatan peluang dan manfaat dari partisipasi tersebut. Pembangunan olahraga dianggap sebagai metode konvensional untuk membangun dan meningkatkan olahraga, dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas olahraga. (Green, 2005). Akibatnya, ini berpusat pada kebutuhan organisasi olahraga untuk memastikan masa depan yang berkelanjutan dengan menarik dan mempertahankan peserta yang cenderung maju melalui sistem dan mewakili olahraga di tingkat elit. (Shilbury et al., 2008). Pembangunan melalui olahraga (Development through Sport) merupakan pendekatan yang memandang bahwa olahraga sebagai mesin yang kuat untuk menggerakkan berbagai skema pembangunan seperti: memfasilitasi diplomasi dalam hubungan internasional); Pembangunan manusia, fisik dan psikologis; Promosi pemahaman budaya; Pembangunan infrastruktur; Promosi kesehatan dan pencegahan penyakit; Pemberdayaan perempuan dan anak perempuan; Integrasi sosial dan pengembangan modal sosial; Penggerak pembangunan ekonomi (Levermore, 2008). Pembangunan melalui olahraga (Development through Sport) memberikan fokus pada peranan olahraga dalam meningkatkan kesejahteraan individu, komunitas, masyarakat dan partisipasi dalam olahraga dipahami secara inheren baik dan berkontribusi pada komunitas yang sehat baik secara fisik maupun sosial (Shilbury et al., 2008).

Beberapa negara maju sudah menerapkan pembangunan melalui olahraga, Korea Selatan dan Jepang adalah contoh negara yang sudah menerapkan pembangunan melalui olahraga. Jepang menggambarkan cara pencapaian momentum politik yang diperlukan dalam rangka penegakan undang-undang baru tentang olahraga yang terbagi menjadi beberapa bagian. Bagian pertama menunjukkan arti-penting dan kepentingan pemerintah dan politik yang sedang terjadi tetapi berkembang dalam olahraga. Bagian kedua menjelaskan tiga pokok utama dalam pengesahan Undang-Undang Dasar Olahraga, dan pada bagian ketiga memetakan secara sekilas struktur administrasi olahraga di Jepang (Yamamoto, 2012). Selama beberapa dekade terakhir, dunia internasional mengakui bahwa Korea Selatan telah mencapai kinerja yang sangat baik dalam ajang olahraga internasional baik sebagai peserta maupun sebagai penyelenggara. Kesuksesan Korea Selatan dalam olahraga elit (yaitu pendekatan Pengembangan Olahraga) telah berkontribusi menjadikan Korea Selatan sebagai salah satu pusat kekuatan olahraga di dunia, Namun, dalam beberapa tahun ke belakang, pemerintah Korea Selatan mulai menunjukkan minat pada pendekatan 'pembangunan melalui olahraga' untuk menjadi negara olahraga yang benar-benar maju (Ha et al., 2015).

Olahraga dapat memberikan pengaruh positif pada kesehatan masyarakat, dan olahraga juga telah banyak dimanfaatkan untuk pengembangan kualitas hidup di seluruh dunia (Reis et al., 2015). Memelihara kesehatan dan kebugaran tubuh dapat mendukung produktivitas sumber daya manusia. Hal tersebut dapat terwujud salah satunya melalui kebijakan pemerintah tentang pembangunan olahraga. Olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi merupakan ruang lingkup dalam pembangunan olahraga. Ketiganya harus dilaksanakan melalui pembinaan dan pengembangan yang direncanakan sehingga masyarakat menjadikan olahraga sebagai gaya hidup, pembibitan dan pemanduan bakat olahraga, pembangunan sentra olahraga

dan sistem kompetisi yang baik sehingga prestasi olahraga bisa tercapai dengan maksimal (Rahadian & Ma'mun, 2018).

Sistem pembangunan olahraga dilaksanakan dengan proses yang tidak singkat melalui manajemen yang harus dipikirkan dengan baik. Untuk membina olahraga secara sistematis dan mendukung pembangunan olahraga, totalitas dan komitmen diperlukan. Denmark, Swedia, Norwegia, dan Finlandia memiliki kebijakan olahraga yang sangat penting untuk mencapai tujuan kesejahteraan olahraga dan olahraga untuk semua, yang berdampak positif pada masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah yang mengatur fasilitas olahraga harus lebih luas. Melalui kebijakan yang dibuat oleh pemerintahnya, kota-kota di negara tersebut tampaknya mampu melakukan tugas ini. (Bergsgard et al., 2017). Prestasi olahraga merupakan sesuatu yang bisa terlihat dan dapat diukur. Mulai dari pemanduan bakat hingga proses pembinaan, pembinaan olahraga dilakukan secara ilmiah. Dari perspektif sistem, kualitas masukan (input) dan proses pembinaan menentukan kualitas hasil (out put). Subsystem antara input dan proses yang tidak optimal menyebabkan prestasi saat ini. (Firdaus, 2011).

Secara historis, pemerintah nasional bertanggung jawab untuk membuat kerangka hukum yang memungkinkan semua orang memiliki fasilitas olahraga. Namun, sebagian besar keputusan penting tentang pembentukan dan pengelolaan fasilitas olahraga dibuat di tingkat kota (Bergsgard & Norberg, 2014). Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional Bab VII pasal 21 ayat 1 menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya. Ayat 2 menyatakan pembinaan dan pengembangan sebagaimana di maksud pada ayat (1) meliputi pengolahraga, ketenagaan, pengorganisasian, pendanaan, metode, sarana dan prasarana, serta penghargaan dan keolahragaan. Selain itu, Pemerintah daerah juga mempunyai tugas pokok yaitu untuk melaksanakan dan mengkoordinasikan pembinaan olahraga. Upaya pemerintah daerah dalam pembinaan olahraga selain untuk peningkatan prestasi baik untuk lokal, regional, nasional maupun internasional, juga merupakan usaha untuk memajukan kegiatan di bidang olahraga. Oleh karena olahraga adalah untuk semua warga negara, pemerintah daerah harus memastikan bahwa semua warga negara dapat berpartisipasi dalam kegiatan olahraga tanpa diskriminasi. Dengan demikian, olahraga harus menjadi bagian dari kebijakan publik untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. (Lutan, 2003).

Undang-Undang No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional menyatakan bahwa olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial. Karena kurangnya minat dan apresiasi masyarakat terhadap olahraga, masyarakat Indonesia masih kurang menyadari pentingnya hidup sehat. Menurut Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), partisipasi olahraga penduduk berumur 10 tahun ke atas telah menurun. Partisipasi olahraga hanya meningkat 22,6% pada tahun 2000 menjadi 25,4% pada tahun 2003. (Badan Pusat Statistik, 2003). Partisipasi olahraga penduduk di daerah kota lebih tinggi jika dibandingkan dengan penduduk di pedesaan. Kondisi tersebut dikarenakan fasilitas dan jenis olahraga yang berkembang di perkotaan lebih banyak jika dibandingkan di pedesaan (Kemenpora RI, 2010). Dibutuhkan sarana dan prasarana agar masyarakat dapat terdorong untuk beraktivitas olahraga. Semakin banyak fasilitas olahraga publik yang tersedia, semakin mudah bagi masyarakat untuk menggunakannya untuk berolahraga. (Maksum, 2004). Oleh karena itu, tersedianya Sarana dan Prasarana Olahraga Publik dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam berolahraga.

Kota Sukabumi merupakan salah satu kota di Provinsi Jawa Barat, secara Geografis terletak di bagian selatan Jawa Barat. Kota Sukabumi terbagi ke dalam 7 Kecamatan dan 33 Kelurahan. Tempat olahraga di Kota Sukabumi sudah ada sejak lama. Namun, selama kepemimpinan Walikota yang baru menjabat dari tahun 2018 hingga 2023, beberapa di antaranya di renovasi pada tahun 2018. Renovasi termasuk GOR Merdeka Kota, yang terletak di perkotaan dan sekitar alun-alun kota. Pemerintah Kota Sukabumi memiliki rencana untuk

membangun Pusat Olahraga Kelurahan dengan anggaran sebesar Rp.180.000.000 untuk setiap kelurahan. Ini adalah salah satu terobosan baru yang dibuat oleh pemerintah saat ini untuk memberi orang kesempatan untuk menikmati dan memanfaatkan pusat olahraga ini untuk berolahraga. Kelurahan Sport Center, juga dikenal sebagai Lapang Renyah (Religius, Nyaman, dan Sejahtera), saat ini telah dibangun di 15 lokasi berbeda di Kota Sukabumi sebagai bagian dari program unggulan Walikota dan Wakil Walikota. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan mengenai sarana dan prasarana Olahraga di Kota Sukabumi dan mengetahui kondisi sarana dan prasarana olahraga di Kota Sukabumi.

## **METODE**

Penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif verifikatif. metode kualitatif verifikatif merupakan format desain penelitian yang lebih banyak menekankan pada data yang ditemukan dilapangan dengan strategi juga konstruksi sehingga penelitian akan bermodel induktif.

## **LOKASI DAN SUBJEK PENELITIAN**

Kota Sukabumi menjadi lokasi penelitian ini. Secara geografis Kota Sukabumi terletak di bagian selatan provinsi Jawa Barat dan berada di kaki Gunung Gede dan Gunung Pangrango. Kota sukabumi terbagi menjadi 7 kecamatan dan 33 kelurahan dengan jumlah penduduk pada tahun 2022 semester 1 berjumlah 355.735 jiwa.

## **TEKNIK PENGUMPULAN DATA**

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah wawancara, studi dokumentasi dan observasi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer diantaranya Walikota Sukabumi, Kepala Aset Daerah Kota Sukabumi, Anggota DPRD Kota Sukabumi, Kepala Disporapar Kota Sukabumi, Camat dan Lurah di Wilayah Kota Sukabumi dan pihak-pihak terkait yang dapat memberikan informasi kepada peneliti, dan Sumber data sekunder yaitu sumber tertulis seperti sumber buku, dan dokumen-dokumen Perda, dimana penelitian ini akan menganalisis bentuk kebijakan yang dikeluarkan atau dibuat oleh Pemerintah Kota Sukabumi No.10 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan keolahragaan.

## **INSTRUMEN PENELITIAN**

Instrumen yang digunakan pada penelitian ini bukan kuesioner atau tes, tetapi peneliti sendiri yang akan menjadi intrumen penelitian. Peneliti akan secara langsung melakukan wawancara, dokumentasi dan observasi sehingga data yang didapatkan akan akurat.

## **TEKNIK ANALISIS DATA**

Penelitian ini menggunakan analisis data untuk mempelajari kebijakan pemerintah tentang penyediaan sarana dan prasarana olahraga publik di Kota Sukabumi. Model analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis komponensial, dan analisis ini dilakukan berulang kali untuk mencapai hasil yang diharapkan oleh peneliti.. Menurut Tahapan-tahapan dalam melakukan analisis komponensial, yaitu: Penggelaran hasil observasi dan wawancara, pemilihan hasil observasi dan wawancara, menentukan elemen-elemen kontras (Bungin, 2012). Oleh karena itu, untuk mendapatkan data yang diinginkan oleh peneliti, analisis komponensial harus dilakukan dengan hati-hati karena hasil dari observasi dan wawancara yang dilakukan secara berulang-ulang sangat penting.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### ***Kebijakan Pembangunan Olahraga Pemerintah Kota Sukabumi***

Pembangunan olahraga di Kota Sukabumi berdasarkan pada visi misi Kota Sukabumi yang menjadi landasan dalam penentuan kebijakan pembangunan olahraga Kota Sukabumi.

Program dan tujuan pembinaan olahraga Kota Sukabumi juga berdasar pada visi misi Kota Sukabumi. Visi Kota Sukabumi yaitu “Mewujudkan Masyarakat yang Religius, Nyaman dan Sejahtera (Renyah)”. Jika melihat visi tersebut, maka pemerintah Kota Sukabumi jelas mengharapkan masyarakatnya sejahtera dalam segala aspek. Tentu saja salah satunya adalah dalam berolahraga. Masyarakat harus memiliki kesempatan untuk berolahraga dengan bebas tanpa ada diskriminasi. Olahraga tidak hanya sekedar aktivitas fisik saja, jauh dari itu, olahraga mengajarkan kepada masyarakat agar dapat hidup maju dan mandiri. Pembangunan olahraga berkaitan dengan kebijakan, proses dan praktik bagaimana memberikan peluang kepada semua orang agar terlibat dalam olahraga dan aktivitas fisik (Taks et al., 2014).

Kebijakan pembangunan olahraga sangat erat kaitannya dengan pelaksanaan olahraga yang terbagi menjadi tiga ruang lingkup yaitu olahraga pendidikan, olahraga prestasi, dan olahraga prestasi. Kebijakan pemerintah daerah dipertegas dengan adanya event-event olahraga yang mengakomodir ketiga ruang lingkup olahraga dan dapat diikuti oleh semua kalangan masyarakat. Peraturan daerah No. 10 Tahun 2015 Pasal 43 Tentang Penyelenggaraan Olahraga yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat menyelenggarakan kejuaraan dan festival Olahraga di Daerah dalam rangka membudayakan Olahraga, menjaring bibit Olahragawan potensial, meningkatkan kesehatan dan kebugaran, menumbuh kembangkan khasanah budaya Daerah, dan meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Berdasarkan peraturan daerah tersebut, maka pemerintah daerah Kota Sukabumi melalui Disporapar Kota Sukabumi memfasilitasi sarana dan prasarana olahraga di setiap kelurahan dengan harapan dapat terlaksananya event olahraga secara masal yang tidak terpaku pada satu lokasi misalnya lapangan merdeka kota Sukabumi, namun dapat terlaksana di setiap wilayah yang tersebar di seluruh kota Sukabumi dan berdampak pada sektor ekonomi dan berdampak pada olahraga pendidikan dan olahraga rekreasi.

Pembangunan fasilitas olahraga di kota Sukabumi yang dikenal dengan program kelurahan Sport center membutuhkan proses dan perencanaan yang matang karena program tersebut merupakan program jangka panjang. Tentu saja terdapat kendala yang dihadapi dalam perencanaan maupun proses pelaksanaan program tersebut. Program kelurahan sport center menggunakan aset pemerintah daerah karena peralatan dan perlengkapan akan menjadi aset daerah. Permasalahan yang terjadi adalah beberapa kelurahan memiliki aset yang minim seperti misalnya tidak ada lahan yang kosong, atau lahan milik pemerintah namun sudah dialokasikan untuk bangunan lain. Sehingga pemerintah harus mencari solusi dalam pembangunan fasilitas olahraga di daerah tersebut.

Ketersediaan fasilitas olahraga di tingkat kelurahan mengurangi aktivitas olahraga yang terpusat di satu titik yaitu di Lapang Merdeka kota Sukabumi. Pembangunan Sport Center membagi partisipasi olahraga masyarakat untuk berolahraga di daerahnya masing-masing, sehingga tidak terjadi kepadatan di Lapang Merdeka Kota Sukabumi yang mengakibatkan sulitnya beraktivitas olahraga karena padatnya warga yang mendatangi Lapang Merdeka Kota Sukabumi. Penyediaan infrastruktur di tingkat kelurahan setidaknya mengurangi animo masyarakat untuk beraktivitas olahraga yang terpusat di satu lokasi saja, karena pada haekatnya olahraga bisa di lakukan dimana saja dan kapan saja.

#### ***Sarana dan Prasarana Olahraga di Kota Sukabumi***

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dispora urusan kepemudaan dan olahraga, pada tahun 2018-2020 terdapat peningkatan dukungan dari pemerintah kota sukabumi dalam penyediaan fasilitas, sarana dan prasarana olahraga. Pernyataan tersebut berdasarkan Indikator jumlah gelanggang olahraga yang terdapat di daerah adalah 2 unit yang selalu dilakukan revitalisasi setiap tahunnya agar kualitas sarana dan prasana selalu terjaga bahkan meningkat. Selanjutnya, jumlah lapangan olahraga pada tahun 2018 tersedia 9 unit. Namun, pada tahun 2020 bertambah menjadi 15 titik yang dibagi ke dalam 15 kelurahan dari total target 33 titik untuk seluruh kelurahan di Kota Sukabumi.

Kota sukabumi memiliki fasilitas resmi sebagai penunjang kegiatan olahraga dan pembinaan olahraga. Pengelolaan fasilitas tersebut diserahkan kepada Disporapar. Fasilitas

tersebut yaitu Stadion Suryakencana, kolam renang rengganis, GOR tenis meja rengganis, GOR indoor Merdeka dan kelurahan Sport Center yang terdapat di setiap kelurahan Kota Sukabumi. Adanya beberapa fasilitas tersebut diharapkan dapat dikelola dengan baik karena fasilitas tersebut merupakan fasilitas terbaik yang dimiliki oleh Kota Sukabumi. Namun semuanya bergantung pada pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Sukabumi sehingga pemanfaatan dan pengontrolan sarana dan prasarana dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan

Sepanjang tahun 2018 sampai 2020, sarana dan prasarana olahraga di Kota Sukabumi mengalami peningkatan. Hal tersebut menunjukkan adanya perubahan dan terobosan-terobosan baru terkait pembangunan olahraga sehingga pembangunan olahraga di Kota Sukabumi menjadi semakin baik. Ketersediaan fasilitas olahraga tentunya harus mewadahi ketiga ruang lingkup olahraga sebagaimana tertuan dalam Undang-undang sistem keolahragaan nasional yaitu olahraga prestasi, olahraga rekreasi, dan olahraga pendidikan, sehingga seluruh lapisan masyarakat bisa mengakses fasilitas olahraga tersebut. Proses pembinaan dan pembangunan olahraga tidak hanya sekedar tersedianya fasilitas olahraga, adanya atlet serta pelatih, namun harus melihat potensi olahraga dan dapat dikembangkan. Dengan demikian, pemerintah daerah harus mengambil langkah dalam pelaksanaan pembangunan olahraga (Wahab, 2013).

### ***Pemanfaatan***

Pemanfaatan fasilitas yang terdapat di Kota Sukabumi harus melalui prosedur yang sudah ditentukan oleh Pemerintah Kota Sukabumi. Namun, proses tersebut tidak berjalan sulit, bahkan pemerintah kota Sukabumi selalu memberikan dukungan terhadap siapa saja yang akan menggunakan fasilitas olahraga dalam rangka kegiatan pembinaan olahraga. Hal tersebut dirasakan oleh organisasi Formi yang merasa difasilitasi dan didukung oleh pemerintah Kota Sukabumi melalui dispora untuk mengadakan event olahraga. Masyarakat kota Sukabumi sudah semestinya memanfaatkan dan menikmati Fasilitas olahraga yang tersedia di Kota Sukabumi. Meskipun pada kenyataannya ketersediaan fasilitas olahraga tersebut melalui proses yang tidak instan. Kondisi fasilitas olahraga yang memudahkan masyarakat dalam beraktivitas olahraga harus dilakukan pengawasan dan pengelolaan yang baik sehingga partisipasi masyarakat dalam berolahraga tidak mengalami penurunan. Fasilitas olahraga berstandar nasional tidak menjadi jaminan tingginya animo masyarakat untuk melaksanakan kegiatan olahraga di tempat tersebut. Maka dibutuhkan edukasi yang diberikan kepada masyarakat karena latar belakang pendidikan masyarakat tentunya berbeda-beda sehingga mempengaruhi pemanfaatan fasilitas olahraga tersebut.

Sarana dan prasarana yang dibangun oleh pemerintah Kota Sukabumi berdampak langsung terhadap aktivitas olahraga yang dilakukan oleh masyarakat. Namun terdapat beberapa kekurangan yang harus menjadi bahan evaluasi yaitu pemanfaatannya fasilitas olahraga yang belum jelas sehingga tidak ada kegiatan yang terstruktur dan berdampak terhadap pemanfaatan fasilitas olahraga yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan olahraga. Pemanfaatan fasilitas olahraga belum optimal. Meskipun di beberapa kelurahan sudah dibangun fasilitas olahraga berupa sport center, tetapi masyarakat tetap berbondong-bondong mendatangi lapangan olahraga untuk berolahraga, bahkan tidak hanya berolahraga, melainkan mencoba berbagai kuliner dan merasakan tempat hiburan yang ada di sekitar Lapangan Merdeka Kota Sukabumi.

### ***Pengelolaan***

Pengelolaan sport center dilaksanakan oleh setiap kelurahan dan seluruh sarana dan prasarana olahraga publik di Kota Sukabumi pengelolanya oleh disporapar. Tujuan pengelolaan sarana dan prasarana olahraga adalah agar setiap sarana dan prasarana olahraga kualitasnya tetap terjaga dan tetap terpelihara dengan baik sehingga masyarakat tetap berolahraga dengan semangat. Pengelolaan sarana dan prasarana olahraga menjadi salah satu aspek yang menjadi perhatian pemerintah daerah. Karena, dengan tersedianya sarana dan prasarana olahraga dengan kondisi yang baik, dapat membantu masyarakat untuk menerapkan

gaya hidup sehat yang berdampak pada kesehatan masyarakat saat ini dan masa depan. Tersedianya sarana dan prasarana dengan kondisi yang sangat baik, masyarakat diharapkan berkeinginan untuk selalu berolahraga atas dasar keinginan sendiri dalam rangka menginginkan adanya peningkatan kebugaran dan menyadari bahwa olahraga adalah aktivitas yang sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh. Terbukti dengan adanya sport center masyarakat yang sebelumnya tidak mau berolahraga dengan berbagai alasannya, menjadi semangat untuk mau berolahraga. Apabila masyarakat sadar bahwa sehat itu penting, maka masyarakat juga akan menyadari bahwa olahraga adalah salah satu cara dalam menjaga tubuh agar tetap sehat dan tentu saja menyadari bahwa olahraga adalah aktivitas yang sangat penting.

## **KESIMPULAN**

Implementasi kebijakan pemerintah Kota Sukabumi terhadap pembangunan sarana dan prasarana olahraga sudah terjadi namun belum terpenuhi seluruhnya khususnya Kelurahan Sport center yang direncanakan dapat diselesaikan di 33 kelurahan pada tahun 2020 namun tidak terpenuhi karena adanya pandemic Covid-19. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata menjadi pengelola sarana dan prasarana olahraga di Kota Sukabumi. Terdapat penyediaan biaya pemeliharaan untuk setiap tahun yang dialokasikan ke Pengelolaan sarana dan prasarana dibawah naungan Pemerintah Kota Sukabumi ada penyediaan biaya pemeliharaan setiap tahun yang dialokasikan ke Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata untuk sarana dan prasarana olahraga di Kota Sukabumi. Sarana dan prasarana olahraga di Kota Sukabumi dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum untuk berolahraga. Selain itu sarana dan prasarana olahraga yang tersedia dapat digunakan bagi setiap cabang olahraga untuk pembinaan prestasi. Sarana dan prasarana olahraga yang tersedia sebagian dapat digunakan secara gratis, namun ada juga yang berbayar dengan maksud untuk biaya perawatan agar sarana dan prasarana tersebut dapat selalu digunakan dalam kondisi yang baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2003). *Statistik Sosial Budaya 2003*.  
<https://www.bps.go.id/publication/2007/08/15/afc1724ec7f98294f783f285/statistik-sosial-budaya-2003.html>
- Bergsgard, N. A., Borodulin, K., Fahlen, J., & Høyer-kruse, J. (2017). National structures for building and managing sport facilities : a comparative analysis of the Nordic countries. *Sport in Society*, 0437(December), 1–15.  
<https://doi.org/10.1080/17430437.2017.1389023>
- Bergsgard, N. A., & Norberg, J. R. (2014). Sports policy and politics – the Scandinavian way. *Sport in Society*, 13, No. 4(October), 37–41.  
<https://doi.org/10.1080/17430431003616191>
- Black, D. R. (2017). The challenges of articulating ‘top down’ and ‘bottom up’ development through sport. *Third World Thematics: A TWQ Journal*, 2(1), 7–22.  
<https://doi.org/10.1080/23802014.2017.1314771>
- Bungin, B. (2012). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Raja Grafindo Persada.
- Collison, H. (2018). The commonwealth guide to advancing development through sport. *Sport in Society*, 21(9), 1493–1494. <https://doi.org/10.1080/17430437.2018.1434461>
- Firdaus, K. (2011). Evaluasi Program Pembinaan Olahraga Tennis Lapangan di Kota Padang. *Media Ilmu Keolahragaan Indonesia*, 1, No 2, 128–132.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.15294/miki.v1i2.2027>
- Green, B. C. (2005). Building sport programs to optimize athlete recruitment, retention, and transition: Toward a normative theory of sport development. *Journal of Sport Management*, 19(3), 233–253. <https://doi.org/10.1123/jsm.19.3.233>
- Ha, J. P., Lee, K., & Ok, G. (2015). From Development of Sport to Development through Sport: A Paradigm Shift for Sport Development in South Korea. *International Journal of the History of Sport*, 32(10), 1262–1278.  
<https://doi.org/10.1080/09523367.2015.1062756>
- Kemempora. (2010). *Penyajian Data dan Informasi Statistik Keolahragaan Tahun 2010*. Kemempora RI.
- Levermore, R. (2008). Sport in international development: Time to treat it seriously? *The Brown Journal of World Affairs*, 14(2), 55–66.
- Lutan, R. (2003). Olahraga, Kebijakan, dan Politik: Sebuah Analisis. In *Jakarta: Proyek Pengembangan dan Keresasian Kebijakan Olahraga, Direktorat Jenderal Olahraga, Departemen Pendidikan Nasional*.
- MacIntosh, E., & Spence, K. (2012). An exploration of stakeholder values: In search of common ground within an international sport and development initiative. *Sport Management Review*, 15(4), 404–415. <https://doi.org/10.1016/j.smr.2012.03.002>
- Maksum, A. (2004). Pengkajian Sport Development Index (SDI). *Proyek Pengembangan Dan Keresasian Kebijakan Olahraga Dirjen Olahraga Depdiknas Dan Pusat Studi Olahraga Lembaga Penelitian Universitas Surabaya*.
- Rahadian, A., & Ma'mun, A. (2018). KEBIJAKAN OLAHRAGA DALAM PEMERINTAHAN LOKAL : Sebuah Penelitian dalam Merumuskan Rancangan Induk Pembangunan Olahraga Nasional. *SEMINAR PENDIDIKAN JASMANI – FPOK UPI*, 23–24.
- Reis, A. C., Carvalho, M., & Sousa-mast, F. R. De. (2015). ““ Sport for Development ”” in developing countries : The case of the Vilas Oli ´ mpicas do Rio de Janeiro. *Sport Management Review*, 1–13. <https://doi.org/10.1016/j.smr.2015.01.005>
- Shilbury, D., Popi Sotiriadou, K., & Christine Green, B. (2008). Sport Development. Systems, Policies and Pathways: An Introduction to the Special Issue. *Sport Management Review*, 11(3), 217–223. [https://doi.org/10.1016/S1441-3523\(08\)70110-4](https://doi.org/10.1016/S1441-3523(08)70110-4)
- Taks, M., Green, B. C., Misener, L., & Chalip, L. (2014). Evaluating sport development



outcomes: the case of a medium-sized international sport event. *European Sport Management Quarterly*, 14(3), 213–237.

<https://doi.org/10.1080/16184742.2014.882370>

Wahab, S. A. (2013). *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. PT.Bumi Aksara.

Yamamoto, M. Y. Y. (2012). Development of the sporting nation: Sport as a strategic area of national policy in Japan. *International Journal of Sport Policy*, 4(2), 277–296.

<https://doi.org/10.1080/19406940.2012.685489>